

KATALOG : 7102025.9109

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI



2023

KABUPATEN TAMBRAUW



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SORONG**

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)

KABUPATEN TAMBRAUW 2023

No. Publikasi : 91090.2340
No. Katalog BPS : 7102025.9109

Ukuran Buku : 14,8 X 21 cm
Jumlah Halaman : vi + 39 Halaman

Penyunting : BPS Kabupaten Sorong
Naskah : BPS Kabupaten Sorong
Gambar Kulit : BPS Kabupaten Sorong
Diterbitkan Oleh : BPS Kabupaten Sorong
Dicetak Oleh : BPS Kabupaten Sorong

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) KABUPATEN TAMBRAUW 2023

Anggota Tim Penyusun:

- Penanggung Jawab : Ratna M. H. Gusti, S.E., M.P
- Penyunting : Abed Nego, S.E.
- Penulis : Novelist Friendly Tuharea, SP.
- Gambar Kulit : Fitri Anna Resqiah Asri, A.Md.Stat.
- Pengolah Data : Badan Pusat Statistik – RI

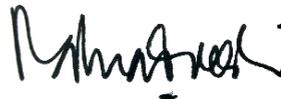
KATA PENGANTAR

Publikasi “Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tambrauw 2023” merupakan publikasi yang menyajikan angka dan penjelasan dari IKK Kabupaten Tambrauw Tahun 2023. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat berbagai kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong yang berkaitan dengan sektor konstruksi serta sebagai bahan baku untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Kritik dan saran sangat diharapkan dari pengguna publikasi ini guna perbaikan pada terbitan selanjutnya.

Sorong, Oktober 2023

Kepala BPS Kabupaten Sorong



Ratna M.H. Gusti, S.E., M.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	6
BAB II KONSEP DAN DEFINISI.....	7
BAB III METODOLOGI.....	17
3.1 Ruang Lingkup dan Sumber Data ...	17
3.2 Metode Penghitungan IKK	17
3.3 IKK 2023	26
BAB IV ANALISIS IKK KABUPATEN TAMBRAUW ...	29
4.1 Profil Kabupaten Tambrau	29
4.2 IKK Kabupaten Tambrau	32
DAFTAR PUSTAKA	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada suatu daerah diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah yang di undang pada tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Tujuan lain dari kebijakan otonomi daerah adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi.

Kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu dilandasi pula oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Transfer ke Daerah (TKD) salah satu sumber pendapatan daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang di alokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk di Kelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Salah satu bentuk Transfer ke daerah (TKD) tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan merupakan belanja negara yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21 sebagaimana telah digantikan oleh UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dana Alokasi Umum merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan

fiskal yang terjadi antar daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melayani masyarakat.

Asas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU tersebut memerlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terkini sehingga pembagian DAU ke setiap daerah menjadi adil, proporsional, dan merata. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan DAU disamping jumlah penduduk, luas wilayah, dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.

IKK sendiri merupakan suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antar wilayah. Untuk menghitung IKK diperlukan beberapa data yaitu: harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi, dan bobot/diagram timbang. Data harga dan upah didapat dari Survei Serentak Harga Barang Bangunan/Konstruksi, Sewa Alat Berat, Upah Jasa Kontruksi dalam rangka penghitungan IKK yang dilakukan setiap triwulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Sementara itu, bobot/diagram timbang IKK diperoleh dari *Bill of Quantity* (BoQ). BoQ merupakan realisasi dari pembangunan suatu konstruksi di kabupaten/kota yang bersangkutan. Realisasi pembangunan tersebut berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 (lima) jenis bangunan yang ditentukan.

Sebagai salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung kebutuhan daerah, IKK berkaitan erat dengan keinginan dan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dengan membangun sarana dan prasarana yang berupa bangunan fisik seperti: bangunan gedung, jalan, jembatan, saluran irigasi, dan lain sebagainya. Perbedaan kondisi dan potensi geografis di masing-masing wilayah serta jarak antar wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan pembiayaan untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar digunakannya IKK untuk penyesuaian kebutuhan daerah dilihat dari sektor bangunan/konstruksi.

Mengingat kebutuhan akan pentingnya angka IKK sebagai komponen penghitungan DAU maka disusunlah publikasi “Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tambrauw 2023” ini, dengan harapan bahwa data yang

termuat dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dalam rangka penghitungan DAU, serta bagi masyarakat, akademisi, atau pelaku usaha yang ingin melihat keterbandingan Kabupaten Tambrauw terhadap daerah-daerah lainnya dalam hal yang berkaitan dengan besaran biaya konstruksi.

<https://tambrauwkab.bps.go.id>

1.2 Tujuan

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penyusunan publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tambrau 2023 ini adalah:

1. Memberikan gambaran komponen-komponen penyusun IKK Kabupaten Tambrau Tahun 2023;
2. Mengetahui berapa nilai IKK Kabupaten Tambrau Tahun 2023;
3. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan daerah dan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten Tambrau kedepannya dapat lebih terarah dan tepat sasaran;
4. Merupakan salah satu ukuran yang dapat menjadi *starting point* bagi Pemerintah Kabupaten Tambrau dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Tambrau pada tahun-tahun yang akan datang; dan
5. Untuk membantu pengambil kebijakan, peneliti, atau konsumen data lainnya dalam memahami keadaan masyarakat Kabupaten Tambrau secara lebih spesifik.

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan IKK antara lain: konsep mengenai harga barang konstruksi termasuk harga sewa alat berat, pedagang besar, pedagang campuran, kegiatan konstruksi, tingkat kemahalan konstruksi, diagram timbang, dan Indeks Kemahalan Konstruksi.

1. **Harga Perdagangan Besar (HPB)** adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama untuk suatu barang.
2. **Harga produsen** adalah harga transaksi yang terjadi antara petani (penghasil) dan pembeli (pedagang besar/distributor) dalam jumlah besar di pasar pertama atas suatu barang.
3. **Harga eceran** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang eceran sebagai penjual dengan konsumen sebagai pembeli secara eceran/satuan yang digunakan untuk konsumsi langsung bukan untuk diperjualbelikan.

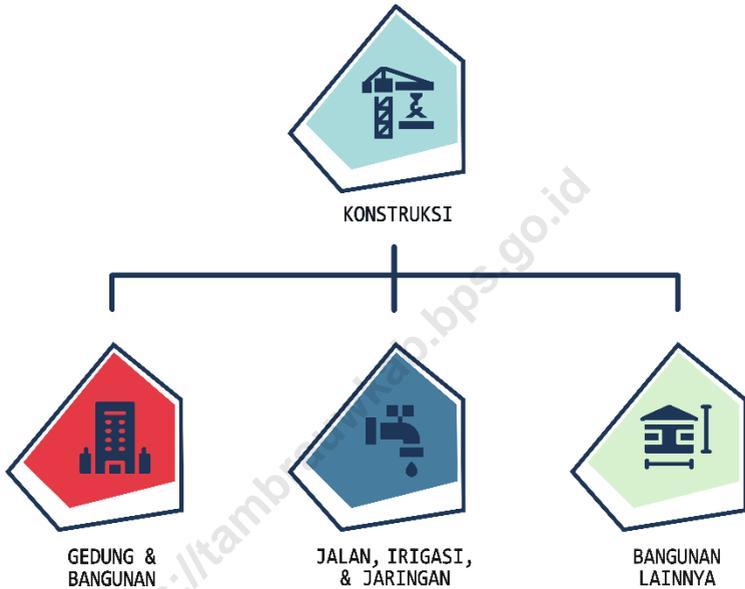
4. **Harga pedagang campuran** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang yang menjual barang secara *party*/grosir dan juga menjual barang secara eceran dengan konsumen baik yang digunakan untuk konsumsi langsung atau konsumsi tidak langsung.
5. **HPB bahan bangunan/konstruksi** adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (*party*) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/ *supplier* bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.
6. **Produsen** adalah penghasil barang-barang yang dilakukan baik secara manual maupun dengan bantuan mesin.
7. **Pedagang besar** adalah pengusaha/pedagang yang menjual bahan bangunan/konstruksi dalam jumlah besar (*party*/grosir).
8. **Pedagang campuran** adalah pedagang yang dalam menjual barang dagangannya sebagian dilakukan secara partai besar dan sebagian lagi dilakukan secara eceran, sedangkan data harga

yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar.

9. **Party/grosir** atau jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.
10. **Kegiatan konstruksi** adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan.

Sektor konstruksi diklasifikasikan kedalam tiga kategori yang disebut *basic heading* yang dapat dilihat seperti berikut:

Gambar 1.
Basic Heading



Gedung dan bangunan yang termasuk dalam perhitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Gedung dan bangunan untuk tempat tinggal, meliputi rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas.
2. Gedung dan bangunan bukan untuk tempat tinggal meliputi gedung perkantoran, industri, kesehatan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam perhitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Bangunan umum untuk pekerjaan pertanian, terdiri dari:
 - a. Bangunan pengairan, yaitu meliputi pembangunan waduk (*reservoir*), bendungan (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, yaitu meliputi bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, terdiri dari:
 - a. Pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi pembangunan jalan dan jembatan kereta.

- c. Bangunan dermaga, meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi terdiri dari:
- a. Bangunan elektrikal, meliputi pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.
 - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 - c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - d. Konstruksi sentral komunikasi, meliputi bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
 - e. Instalasi air, meliputi instalasi air bersih dan air limbah, dan saluran drainase pada gedung.

- f. Instalasi listrik, meliputi pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah, dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan tinggi.
- g. Instalasi gas, meliputi pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal, dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- h. Instalasi listrik jalan, meliputi instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
- i. Instalasi jaringan pipa, meliputi jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan klasifikasi untuk bangunan lainnya terdiri dari bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab, dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk

peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

11. **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/ organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, mingguan, dan bulanan. Harga sewa termasuk biaya sewa alat, jasa operator alat, tetapi tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek dan bahan bakar.
12. **Upah** adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kegiatan konstruksi, upah jasa konstruksi meliputi upah mandor, kepala tukang, tukang, dan pembantu tukang.
13. **Paket komoditas** adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas/jenis barang tersebut dipilih karena memenuhi asas *representativeness* dan *comparability* yaitu andil yang cukup besar dan data harganya dapat dipantau serta mempunyai tingkat

keterbandingan antar kabupaten/kota. Paket komoditas disebut juga sebagai kualitas nasional.

14. **Kualitas provinsi** adalah kualitas yang dominan disuatu provinsi tetapi tidak dominan bila ditinjau secara nasional. Kualitas provinsi digunakan sebagai dasar konversi kedalam kualitas nasional untuk kualitas nasional yang memang tidak terdapat di provinsi tersebut.
15. **Diagram timbang** atau bobot yang digunakan dalam penghitungan IKK 2023 terdiri dari diagram timbang IKK dengan pendekatan *Basket of Construction Components Approach* (BOCC) dan diagram timbang Umum. Diagram timbang umum yang digunakan dalam penghitungan IKK 2023 berasal dari realisasi anggaran daerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk pembangunan konstruksi.
16. **Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)** adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap tingkat kemahalan konstruksi rata-rata nasional.
17. **Bill of Quantity (BoQ)** adalah daftar dan kuantitas pekerjaan yang penyusunan dan perhitungannya didasarkan atas gambar lelang,

spesifikasi teknis, dan spesifikasi umum yang digunakan sebagai standar acuan bagi peserta lelang dalam mengajukan penawaran harga.

<https://tambrauwkab.bps.go.id>

BAB III

METODOLOGI

3.1 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Data dasar yang digunakan dalam penghitungan IKK tahun 2023 adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang diperoleh dari survei secara serentak seluruh kualitas dari jenis barang yang memberikan andil besar dalam pembuatan suatu bangunan/konstruksi di seluruh kabupaten/kota. Sebagai pendukung, terdapat juga data BoQ yang diperoleh melalui kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum. BoQ yang digunakan dalam penghitungan IKK 2023 berupa realisasi pelaksanaan proyek menurut kelompok jenis pada tahun 2021 dan 2022.

3.2 Metode Penghitungan IKK

Komponen yang digunakan dalam penghitungan IKK didasarkan pada paket komoditas yang dipakai sebagai pendekatan dalam merumuskan Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK). TKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan/ konstruksi per satuan

ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diperoleh melalui pendekatan terhadap sejumlah bahan bangunan, dan jasa yang menjadi paket komoditas. Paket komoditas yang dimaksud mencakup barang-barang natural/penggalian, barang-barang hasil industri, serta sewa alat berat dan jasa. Dalam menyusun paket komoditas ini, didasarkan pada asas *comparability* (keterbandingan), *representativeness* (keterwakilan), dan *trade off comparability vs representativeness*.

Setelah paket komoditas didapatkan, maka dibutuhkan pula diagram timbang kelompok jenis bangunan. Diagram timbang ini disusun berdasarkan kuantitas/volume bahan bangunan dan jasa yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas (m^2) menurut kelompok jenis bangunan/konstruksi.

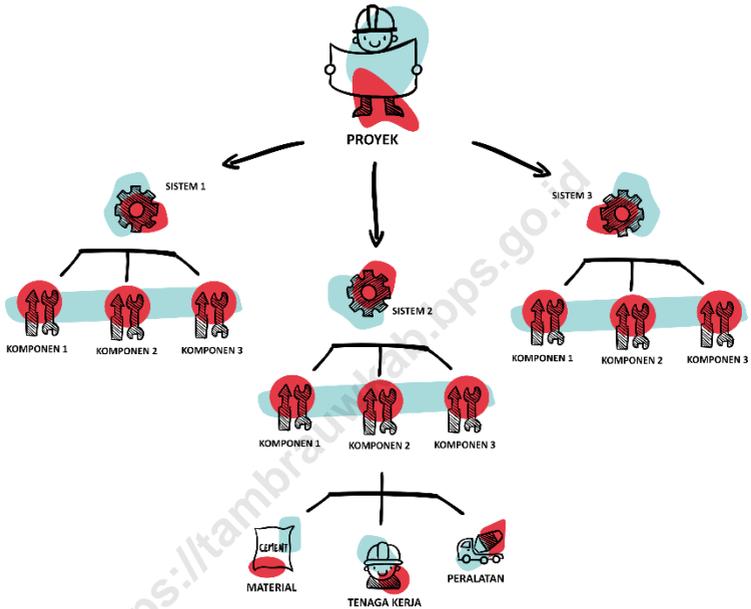
Diagram timbang ini juga diperlukan untuk pembentukan TTK setiap jenis barang. Data-data dalam diagram timbang ini didapatkan dari BoQ dari berbagai pihak yang telah melaksanakan proyek konstruksi sepanjang tahun 2021 dan 2022. Kemudian untuk melengkapi komponen di atas diperlukan pula data harga bahan bangunan dan tarif sewa alat berat yang

dikumpulkan melalui survei serentak yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Sorong.

Diagram timbang pada IKK 2023 menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC) yang didesain dengan tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan dalam IKK 2023 ini terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode BoQ.

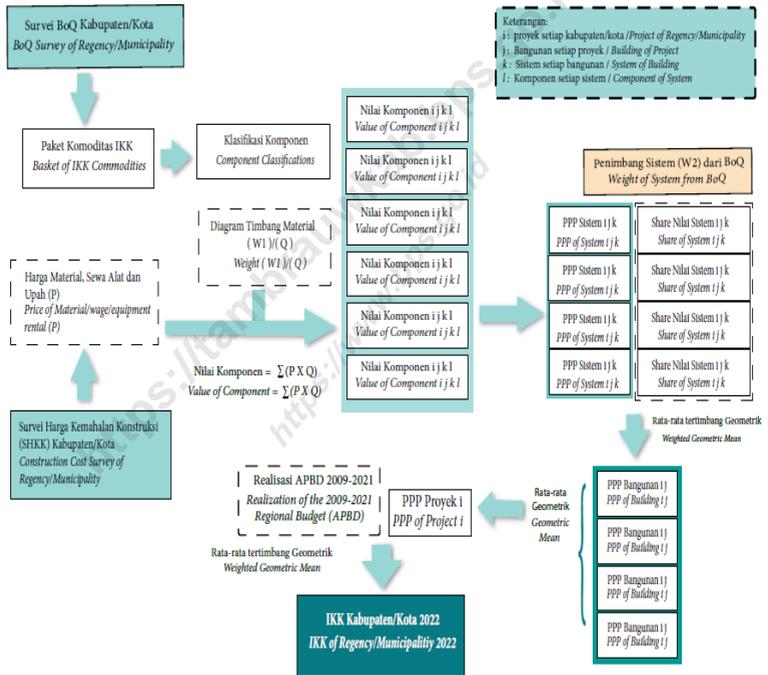
Gambar 2.
Hubungan antara proyek, sistem dan komponen



Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, serta koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep yang mendasar dari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen kemudian dibagi kembali kedalam beberapa item pekerjaan konstruksi. Setelah diperoleh komponen-komponen

penyusun IKK diatas maka dapat dilakukan penghitungan berdasarkan formula dengan alur seperti dibawah ini.

Gambar 3.
Proses Penghitungan IKK secara Keseluruhan beserta
Penggunaan Penimbang



Dalam proses penghitungan IKK menggunakan 3 (tiga) penimbang yaitu w_1 , w_2 dan w_3 . Penimbang pertama (w_1) yakni Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pembentukan barang modal bangunan yang digunakan untuk menghitung IKK dari PPP

proyek. Penimbang kedua (w_2) yakni data dari *Bill of Quantity* (BoQ) dari kegiatan proyek yang sudah selesai (bukan RAB). Penimbang ini digunakan untuk menghitung PPP jenis bangunan dari PPP sistem. Penimbang ketiga (w_3) yakni dari data Buku Analisa Harga satuan pekerjaan kementrian PUPR berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 28 Tahun 2016 (perubahan atas Peraturan Menteri Tahun 2013) yang digunakan untuk menghitung nilai komponen dari harga material dan upah jasa konstruksi.

Penghitungan IKK 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NKt = \sum_{M=1}^M P_m q_m$$

dengan:

- NKt : nilai komponen ke-1 pada masing-masing sistem dari suatu bangunan di kabupaten/kota
- P_m : harga material/upah/sewa material ke-m

- q_m : kuantitas/volume material/upah/sewa ke-
m
- M : jumlah material/sewa dalam komponen
ke-1

Tahap penghitungan kedua adalah dengan menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP) sistem

$$PPP_{sistem\ ijk} = \left(\prod_{l=1}^L \frac{NK_{k1x}}{NK_{k10}} \right)^{1/L}$$

dengan:

- $PPP_{sistem\ ijk}$: *purchasing power parity* sistem ke-k,
bangunan ke-j, proyek ke-i
- NK_{k1x} : nilai komponen ke-1, sistem ke-k, di
kabupaten kota ke-x
- NK_{k10} : nilai komponen ke-1, sistem ke-k, di
kabupaten/kota acuan
- L : jumlah komponen dalam suatu sistem

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut :

$$PPP_{bangunan\ ijk} = \left(\prod_{k=1}^K PPP_{sistem\ ijk} \right)^{w/2k}$$

dengan:

$PPP_{bangunan\ ijk}$: *purchasing power parity* bangunan ke-j,
proyek ke-i

K : jumlah sistem dalam suatu bangunan

Tahap penghitungan keempat adalah penghitungan PPP proyek menggunakan metode rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{proyek\ i} = \left(\prod_{j=1}^J PPP_{bangunan\ ij} \right)^{1/j}$$

dengan:

$PPP_{proyek\ i}$: *purchasing power parity* proyek ke-i

K : jumlah sistem dalam suatu proyek

Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding. Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalkan pusat distribusi barang, harga cenderung stabil, variasi harga cenderung berada di sekitar harga rata-rata nasional, dan sebagainya.

$$C_0 = \text{dummy kota acuan} = 0$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} \left(\prod_{i=1}^I (PPP_{proyek\ i})^{w_1 i} \right) \cdot 100$$

dengan:

- I : jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota
- W_1 : penimbang yang berasal dari realisasi APBD

Secara garis besar proses penghitungan IKK melalui beberapa tahapan, diantaranya :

- a. Mencari paket komoditas, klasifikasi komponen, dan diagram timbang material dari data BoQ.

- b. Menghitung nilai komponen yakni jumlah dari perkalian antara data harga hasil survei harga kemahalan konstruksi (SHKK) dengan diagram timbang material.
- c. Melakukan rata-rata tertimbang geometrik antara PPP sistem dengan penimbang sistem setiap proyek dan bangunan untuk memperoleh PPP bangunan.
- d. Melakukan rata-rata geometrik dari PPP bangunan untuk memperoleh PPP proyek
- e. Melakukan rata-rata tertimbang geometrik antara PPP proyek dengan rata-rata data realisasi APBD tahun 2009-2022 untuk memperoleh angka IKK

3.3 IKK 2023

IKK telah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dan sebagainya. Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ

2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2023 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan *updating* BoQ sampai tahun 2022.

IKK tahun 2023 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2022, Oktober 2022, Januari 2023, dan April 2023. Seperti halnya IKK sebelumnya, IKK tahun 2023 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi.

Kota acuan pada penghitungan IKK 2023 adalah Kota Makassar, berubah dari Kota Semarang di tahun 2018-2020. Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati indeks rata-rata nasional dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data.

Pada proses penghitungan IKK tahun 2023, dilakukan penyempurnaan sewa alat berat murni berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2016. Penghitungan sewa alat berat murni dilakukan dengan cara mengeluarkan biaya mobilisasi alat, biaya bahan bakar (solar), biaya pelumas, biaya operator, serta biaya perbaikan dan perawatan dari total biaya sewa alat berat. Penyempurnaan penghitungan sewa alat berat merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas data IKK.

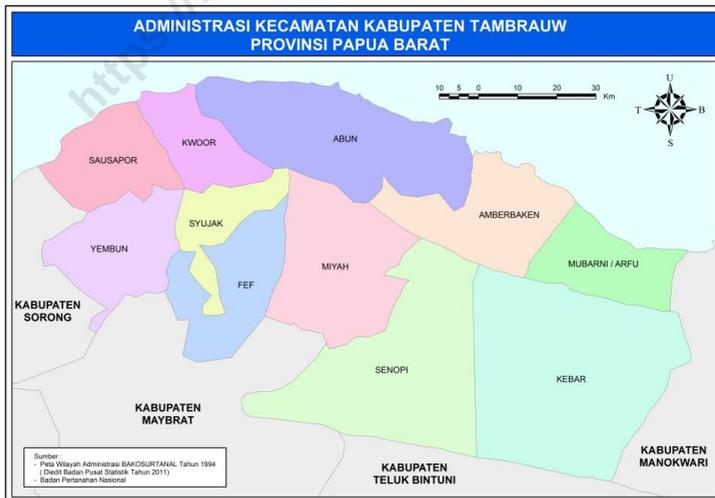
BAB IV

ANALISIS IKK KABUPATEN TAMBRAUW

4.1 Profil Kabupaten Tambrauw

Kabupaten Tambrauw yang terletak di puncak kepala burung Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu Kabupaten yang baru terbentuk di Provinsi Papua Barat Daya. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008. Adapun luas wilayah Kabupaten Tambrauw sebesar 11.529,182 Km².

Gambar 4.
Peta Wilayah Kabupaten Tambrauw



Secara geografis, Kabupaten Tambrauw terletak pada koordinat $00^{\circ} 15'$ hingga $01^{\circ} 00'$ Lintang Selatan dan $132^{\circ} 00'$ hingga $133^{\circ} 00'$ Bujur Timur. Sedangkan batas administratif Kabupaten Tambrauw adalah sebagai berikut:

- Utara : Samudera Pasifik
- Selatan : Kabupaten Sorong Selatan
- Timur : Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari
- Barat : Kabupaten Sorong

Wilayah administrasi Kabupaten Tambrauw terdiri dari 29 distrik yaitu Fef, Syujak, Ases, Tinggouw, Miyah, Miyah Selatan, Ireres, Wilhem Roumbouts, Abun, Kwoor, Tobouw, Kwesefo, Sausapor, Bikar, Yembun, Bamusbama, Kebar, Kebar Timur, Kebar Selatan, Manekar, Senopi, Mawabuan, Amberbaken, Mpur, Amberbaken Barat, Muhrani, Moraid, Selemkai, dan Kasi. Distrik Fef merupakan ibukota Kabupaten Tambrauw.

Pada tahun 2023 Kabupaten Tambrauw memiliki jumlah penduduk sebanyak 35.742 jiwa yang tersebar di 29 kecamatan/distrik. Dengan luas wilayah sebesar $\pm 11.529,182 \text{ Km}^2$, kepadatan penduduk Kabupaten Tambrauw pada tahun 2023 sebesar 3,10 jiwa/ Km^2 . Salah satu tujuan pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah meningkatkan pemerataan

persebaran penduduk. Melalui pemerataan penduduk, secara umum dapat membantu dalam usaha peningkatan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu idealnya adalah komposisi jumlah penduduk sejalan dengan luas wilayah keruangan suatu wilayah.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk, Luas wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tambrau Tahun 2023

No	Distrik	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Fef	1.247	365,99	3,41
2.	Syujak	451	356,53	1,26
3.	Ases	1.058	275,78	3,84
4.	Tinggouw	392	226,28	1,73
5.	Miyah	778	187,61	4,15
6.	Miyah Selatan	892	461,76	1,93
7.	Ireres	740	431,50	1,71
8.	Wilhem Roumbouts	231	185,01	1,25
9.	Abun	856	845,91	1,01
10.	Kwoor	1.040	212,14	4,90
11.	Tobouw	797	569,59	1,40
12.	Kwesefo	994	379,54	2,62
13.	Sausapor	8.339	457,47	18,23
14.	Bikar	3.062	171,51	17,85

No	Distrik	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
15.	Yembun	1.224	590,63	2,07
16.	Bamusbama	1.032	348,96	2,96
17.	Kebar	1.249	174,42	7,16
18.	Kebar Timur	390	420,93	0,93
19.	Kebar Selatan	1.479	1058,70	1,40
20.	Manekar	702	173,75	4,04
21.	Senopi	726	1221,73	0,59
22.	Mawabuan	759	431,50	1,76
23.	Amberbaken	934	269,96	3,46
24.	Mpur	540	234,60	2,30
25.	Amberbaken Barat	2.056	362,19	5,68
26.	Mubrani	820	173,32	4,73
27.	Moraid	684	499,01	1,37
28.	Salemkai	1.279	372,04	3,44
29.	Kasi	991	70,83	13,99

Sumber: BPS, Kabupaten Sorong dalam Angka 2023

4.2 IKK Kabupaten Tambrauw

Indeks Kemahalan Konstruksi merupakan angka indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK secara rata-rata Nasional. Semakin tinggi IKK suatu daerah, maka biaya yang diperlukan untuk

membuat suatu bangunan juga semakin besar, atau dengan kata lain kegiatan distribusi bahan bangunan/konstruksi di daerah tersebut lebih sulit jika dibandingkan daerah lainnya. IKK yang rendah menunjukkan adanya nilai tambah suatu daerah terkait distribusi bahan bangunan/konstruksi yang berjalan baik dan kemudahan dalam membuat suatu bangunan. Adapun hasil penghitungan IKK kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.
IKK Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2019 – 2023

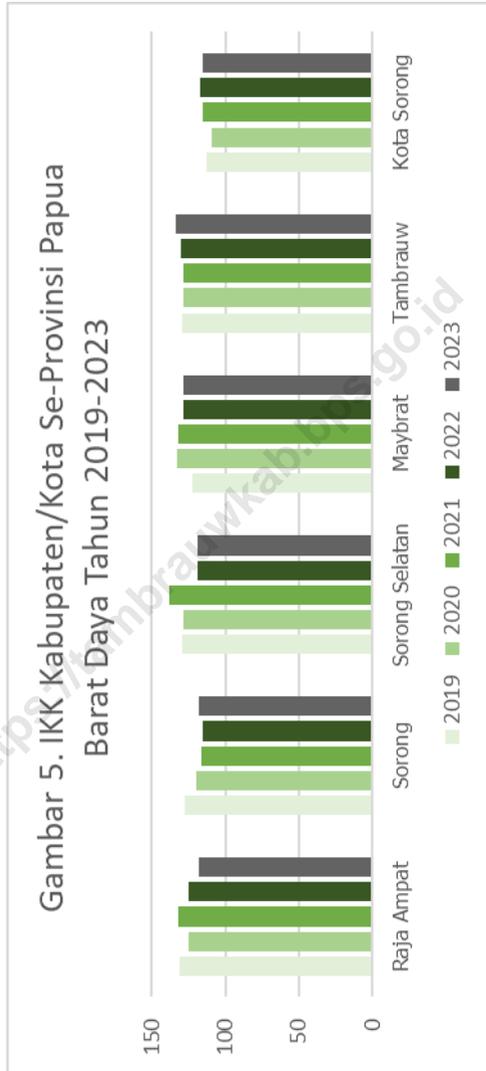
No	Kabupaten	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Raja Ampat	131,12	125,22	131,59	124,79	118,04
2.	Sorong	127,39	119,93	116,23	115,09	117,78
3.	Sorong Selatan	129,04	128,36	138,18	118,97	119,36
4.	Maybrat	122,63	132,47	131,92	128,63	128,25
5.	Tambrau	129,16	128,92	128,54	130,39	133,79
6.	Kota Sorong	113,03	109,25	115,79	117,26	115,04

Sumber: BPS, Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023

Dari 6 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya, 3 kabupaten/kota yang memiliki IKK tertinggi pada

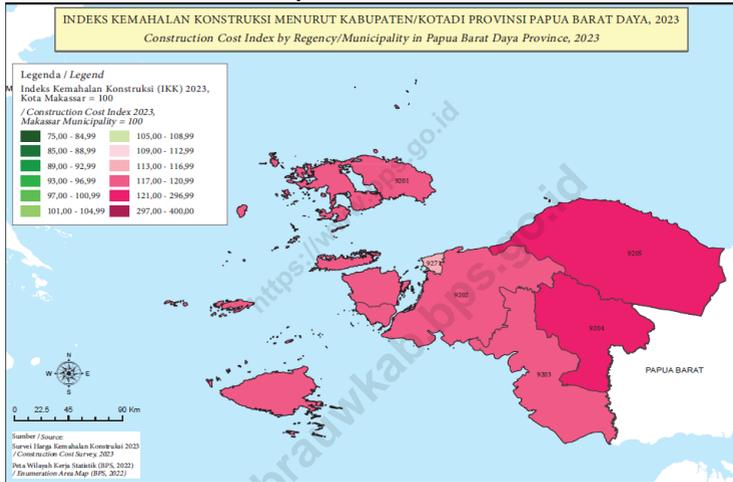
tahun 2023 adalah Kabupaten Tambrauw sebesar 133,79; Kabupaten Maybrat sebesar 128,25; dan Kabupaten Sorong Selatan sebesar 119,36. Sedangkan 3 kabupaten/kota yang memiliki IKK terendah yaitu Kota Sorong sebesar 115,04; Kabupaten Sorong sebesar 117,78; dan Kabupaten Raja Ampat sebesar 118,04.

Secara umum, terjadi fluktuasi angka IKK Tahun 2022 pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya. Pada tahun 2023, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw mengalami kenaikan IKK masing-masing sebesar 2,69 poin, 0,39 poin, dan 3,40 poin. Sedangkan Kabupaten Raja Ampat, Maybrat, dan Kota Sorong mengalami penurunan IKK masing-masing sebesar 6,75 poin, 0,38 poin, dan 2,22 poin. Kabupaten Tambrauw sendiri menempati posisi ke-1 IKK tertinggi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya sebesar 133,79 angka ini mengalami kenaikan sebesar 3,4 poin dibanding tahun 2022.



Sumber: BPS, Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023

Gambar 6.
IKK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
Daya Tahun 2023



Sumber: BPS, Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023

Sebelumnya, Kabupaten Tambrau merupakan bagian dari Kabupaten Sorong. Kondisi geografis yaitu jarak yang jauh menyebabkan mahalnya biaya transportasi sehingga berdampak pada tingginya harga barang-barang termasuk bahan-bahan konstruksi. Arus masuk barang ke Kabupaten Tambrau pada umumnya berasal langsung dari Kota Sorong, khususnya untuk barang-barang pabrik. Sebagai daerah pemekaran yang baru, keberadaan *supplier* yang mampu menyediakan barang-barang untuk kebutuhan konstruksi masih belum ada. Di sisi lain,

Kabupaten Tambrau yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti infrastruktur jalan dan jembatan menyebabkan arus distribusi barang ke Kabupaten Tambrau menjadi agak sulit. Arus distribusi juga bisa menjadi semakin sulit jika kondisi cuaca buruk karena akses jalan utama Kota Sorong - Kabupaten Tambrau yang masih belum diaspal sepenuhnya akan rusak.

Penggunaan barang-barang konstruksi yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Tambrau masih lebih besar bila dibandingkan dengan komoditas yang berasal dari dalam wilayah Kabupaten Tambrau sendiri. Bangunan konstruksi memerlukan berbagai macam jenis barang/bahan konstruksi yang saling melengkapi mulai dari pasir, batu, batu-bata, kayu, besi, semen, kaca, pipa, seng, aspal, dan sebagainya hingga penggunaan alat berat.

Diantara barang-barang konstruksi tersebut beberapa diantaranya dapat dihasilkan di Kabupaten Tambrau tanpa harus didatangkan dari luar kabupaten, seperti pasir, batu, dan kayu. Harga komoditas lokal tersebut tercatat relatif lebih murah dibandingkan harga rata-rata produk sejenis di Provinsi Papua Barat Daya, namun karena *share* pemakaiannya dalam bangunan

konstruksi relatif kecil, pengaruhnya terhadap Tingkat Kemahalan Konstruksi juga tidak terlalu besar yang artinya pembentukan Tingkat Kemahalan Konstruksi lebih didominasi oleh barang-barang konstruksi yang di datangkan dari luar Kabupaten Tambaui.

<https://tambauwkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2023. *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023*.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Kabupaten Sorong Dalam Angka 2023*.
- UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SORONG**

Jl. Osok, Km. 18, Aimas, Kabupaten Sorong

Telp (62-951) 335485

Faks (62-951) 335901

Mailbox : bps9107@bps.go.id